

KEGAGALAN PILKADES SEBUAH AIB

ATAUKAH BUKTI KEDEWASAAN POLITIK KITA:

Abstraksi : Tinjauan Budaya Politik Lokal dari Perspektif Content Analysis¹

Untuk mengantarkan kita pada diskusi ini saya mencoba untuk mendeskripsikan persoalan Pilkades di Klaten Jawa Tengah dengan metode *content analysis* (studi Analisis Isi) pada Surat Kabar Suara Mereka pada Bulan Desember 1997 tentang fenomena Pilkades di Klaten Jawa Tengah.

Sebagaimana diketahui bahwa Pilkades di Jawa Tengah sebuah acara suksesi pemerintahan desa yang sebenarnya harus dilaksanakan sebelum Pemilu 1997. Tetapi karena alasan Stabilitas Politik maka pilkades ditunda. Pilkades . *Timing* ini sangat rawan sebab berada pada posisi pasca Pemilu, krisis moneter dan menjelang SU MPR 1998.

Kerawanan ini terbukti di dengan terjadi beberapa kebrutalan atau kekecewaan yang terjadi seperti:

1. Di Blora Tiga Orang membakar Balai Desa karena kecewa Pilkades. (SM, 13/12)
2. Balai Desa Papasan Jepara dibakar karena jagonya kalah (SM , 20/12)
3. Di Sragen Jago kalah merusak Balai Desa (SM, 20/12)
4. Di Pati Rumah Panitia Pilkades dibakar massa yang kecewa Pilkades(SM,16/12)
5. Batal Jadi Kades Gugat Pemda Jepara Rp. 75 Juta (SM 9/12)
6. Di Brebes 12 Pilkades berrmasalah (SM, 12/12)
7. Di Sukoharjo: Masalah Pilkades timbul karena ulah oknum aparat (16/12)
8. Di Slawi Beberapa Pilkades Diundur karena tak penuh Kuorom (5/12)
9. Di Temanggung Pilkades 130 desa terlambat (5/12)

Sementara di Pilkades di Kabupaten Klaten berdasarkan studi isi pada Suara Merdeka dapat di sampaikan dalam bentuk informasi sebagai berikut:

Hasil Pilkades tahap I di 153 Desa, dengan beaya 78,2 Juta lebih, dengan tingkat keberhasilan 96 % (5 Desa gagal/ diulang) . Rencananya tahap II 75 desa beaya 48,7 juta lebih dilaksanakan setelah SU MPR 1998.

Dari Pelaksanaan tahap I Pilkades Di Klaten hampir tidak terjadi aksi kekerasan yang berarti hanya pembacokan di di Bendo Tulung . Tetapi aksi protes terus terjadi hampir disemua pilkades terutama dari pihak calon atau pendukung yang gagal. Baik lewat Surat resmi, surat kaleng, Demonstrasi (Penduduk Kragilan Gantiwarno melakukan demonstrasi di Kecamatan dan di DPRD dalam waktu yang berbeda), lewat Pos 5000, lewat LBH dan PTUN lain- lain. Beberapa desa yang secara aktif mengadakan protes selain Kragilan adalah Jebungan Klaten Utara, Troketan Pedan, Klepu Ceper, Sidowayah Polanharjo, dan lain-lain.

Hal yang mereka proteskan adalah kecurangan Pilkades, Suap, jual beli suara, intimidasi, dan lain-lain. Dilihat dari figur kades yang terpilih, tampaknya terjadi

¹ Di sampaikan sebagai Abstraksi dalam diskusi ilmiah Aktualita PD IRM Klaten tanggal 26 Desember 1997 oleh **Fahrudin Eka Cahyana SSos**: Ketua Litbang PD IRM Klaten, Dosen Tetap pada Akademi Akuntansi Muhammadiyah (AAM) Klaten, Dan sedang Menyelesaikan Magister Pendidikan.

pergeseran, seperti, mantan kebanyakan mengalami kekalahan, Berkurangnya Kades Putri terpilih, Dan kualitasnya masih perlu dipertanyakan.

Dalam menanggapi Protes Pilkades DPRD dinilai Mandul, karena kurang mampu menyelesaikan permasalahan, sehingga DPRD terkesan hanya sebagai tempat penampungan protes, Menanggapi kritik ini beberapa kalangan DPRD berpendapat bahwa Asumsi dewan harus gontok-gontokan dengan atau bermusuhan dengan eksekutif adalah salah. Secara nomartif tidak ada ketentuan yang menyebutkan bahwa pengaduan harus ke DPRD. Kami menampung aspirasi dan meneruskannya, dan jika tidak ada tanggapan kami terbatas mengejar dan menanyakan sejauh mana penanganan telah dilakukan. Sementara kalangan DPRD sendiri menyadari bahwa menurut UU no 5 tahun 1974 Pemerintah daerah adalah Bupati dan Dewan.

Fenomena lain adalah Bupati Klaten di protes DPRD gara-gara akan melantik Kepala desa di Kantor Desa masing-masing. Permasalahan yang diajukan oleh DPRD adalah masalah kerawanan, sedang Bupati tetap ngotot dengan alasan ingin menunjukkan kepada rakyat tentang eksistensi Kadesnya,

Suap sempat terjadi dalam proses kelulusan Bakal Calon Kades di Klaten, hal ini terjadi terhadap Suwarno dari Mundu Tulung, yang dijanjikan lulus dan ternyata juga lulus oleh Purnomo seorang Mawil Hansip Tulung dengan beaya 5 Juta Rupiah. Menurut Kapolres hal ini akan dilakukan penyidikan lewat pengadilan.

Bengkok akan diganti dengan Gaji UMR juga menjadi isu yang hangat. Hal ini setelah dijelaskan oleh Mardiyono anggota FPP DPRD I Jateng dan dipertegas oleh Thanthowi Jauhari dari Komisi A DPRD Klaten bahwa mulai maret 1998 gaji Kades yang semula Bengkok/ sawah diganti dengan gaji dengan standar UMR.

Dari Deskripsi saya diatas dapat memunculkan permasalahan yang menarik untuk didiskusikan pada hari ini, sebagai mana menjadi sub tema Panitia yakni: Bagaimana Menyoali Perilaku Politik Masyarakat dan birokrasi daerah di Indonesia lewat pelaksanaan Pilkades dengan studi kasus di Klaten.

Wassalam

Tugas Mata Kuliah : Pengembangan Teori teori Sosial
Dosen : dr. zamroni

WANITA DAN KEPENIMPINAN

studi kasus tentang

*muncul nya pemimpin wanita/ Kepala Desa Basir
Dalam Perspektif teori sosial*

Disusun Oleh:

Nama : Fahuudin Eka Cahyana
NIM : 97755015

PROGRAM PASCA SARJANA
INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP)

YOGYAKARTA